created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Dalam rangka pelayanan penyelenggaraan perhubungan di Daerah, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan retribusi daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah pada umumnya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan komponen pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu pendapatan asli daerah yang merupakan komponen penting dalam retribusi daerah adalah pungutan daerah di bagian perhubungan.

Bandung telah membentuk Dinas Perhubungan, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung no. 12 tahun 2008. Dinas Perhubungan ini bertugas sebagai pelaksana sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.

Institusi Pemerintahan merupakan sebuah organisasi dengan sistem yang sangat majemuk dan komplek, dan data mengalir dalam sebuah siklus lalu lintas yang sangat padat. Jika ada sebuah mekanisme yang baik maka muncul permasalahan dalam hal pencarian dan data tertentu oleh pihak-pihak yang membutuhkannya, secara langsung hal ini menyebabkan sulitnya proses monitoring dijalankan.

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Pemerintah Kota Bandung merupakan institusi pemerintahan yang memiliki banyak Dinas/Satuan kerja dan juga membawahi beberapa Kabupaten yang beberapa sistem masing-masing memiliki struktur organisasi tersendiri dan memiliki pola pengembangan data/informasi yang juga relatif tidak sama. Kondisi ini menjadikan proses monitoring yang akan dilakukan oleh pimpinan menjadi relatif agak sulit dan tidak bisa dilakukan dengan cepat.

Permasalahan di atas disadari oleh institusi Dinas Perhubungan Kota Bandung, kemudian setelah melalui proses analisa kebutuhan secara internal munculah keinginan untuk mulai membuat sebuah sistem yang terintegrasi, diawali dengan keinginan untuk membuat sebuah aplikasi managemen data yang terbatas untuk beberapa laporan namun bisa diakses oleh seluruh aparatur maupun kebutuhan internal secara langsung. Setelah data terkumpul dalam sebuah data *warehouse*, pimpinan daerah dan pihak lain yang terkait akan bisa mengambil data ini secara langsung kapanpun diperlukan.

Gubernur Kota Bandung akan mengambil informasi dalam kebutuhan ini, kategorinya yaitu : kepegawaian, asset, dan potensi yang harus langsung dikirimkan oleh pihak SKPD maupun Kabupaten. Format data yang dikirimkan untuk tahap awal adalah dalam format *file*. Tahap berikutnya ketika sosialisasi sudah berjalan baik, inputan dapat diubah dalam sebuah form data, dan bisa dikelola secara lebih luas lagi untuk kebutuhan analisa maupun *reporting*.

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Kebutuhan akan informasi dari Dinas Perhubungan Kota Bandung, dapat disolusikan secara teknis melalui skema dasar. Perlu dibangun sebuah sistem pengelolaan data terpadu dan terpusat supaya kebutuhan akan informasi dapat direalisaikan untuk efektivitas dan efesiensi maka sistem perlu suatu aplikasi yang harus bisa dijalankan melalui jaringan dan terhubung secara *real time* dengan pusat data, data dapat diinput secara langsung dari tiap aparatur Dinas Perhubungan, sistem akan berdiri secara independen, dan integrasi dengan sistem lain akan dijembatani oleh aktivitas manual, hal ini dilakukan karena *user* pengguna yang sangat bervariasi, tetapi jika sistem terikat dengan sistem yang ada secara lokal di *user* maka akan menimbulkan kekomplekan penggunaan.

Sistem Informasi Manajemen Data berguna sebagai pengelola setiap data yang terdapat di SKPD Daerah/Kabupaten untuk kepentingan pemimpin. Sistem informasi manajemen data dibuat untuk membantu pemimpin Daerah dalam setiap pengambilan keputusan yang efektif dan efisien terhadap tiap-tiap SKPD/Kabupaten di Kota Bandung. Dalam hal ini pemimpin/kepala Daerah bisa langsung mengakses data-data dengan cepat tanpa langsung datang ke tiap-tiap SKPD/Kabupaten, dengan demikian segala kepentingan-kepentingan daerah dapat diperhatikan dan dapat ditanggulangi dengan cepat.

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Suatu sistem perlu didefinisikan terlebih dahulu seluruh parameter luar sistem yang akan berpengaruh terhadap sistem itu. Hal ini sangat penting mengingat sistem ini akan dimanfaatkan secara luas oleh komponen-komponen pengguna yang sangat luas dan bervariasi. Tahapan yang harus ditempuh dalam pembangunan sistem supaya dapat berjalan dengan baik, setiap tahapan yang harus dilalui memiliki keterikatan yang kuat. Bahkan lebih besar parameter non teknis, seperti *workshop*, penyiapan infrastruktur, sosialisasi, dan lainnya. Menunjukan bahwa sistem ini akan sangat tergantung pada pengguna dan lingkungan dimana sistem ini akan digunakan.

Hal-hal seperti kondisi kesiapan sumber daya manusia (SDM) dari sisi *admin* maupun *user* bisa disikapi dengan cara melakukan analisa kemampuan, jika dianggap perlu dilakukan peningkatan kemampuan maka segera diberikan pelatihan-pelatihan yang relevan agar pada akhirnya SDM memiliki wawasan dan kemampuan teknis yang memadai. Payung regulasi dan kebijakan pun merupakan faktor penting, tanpa dukungan dari pimpinan yang memiliki kewenangan, maka sistem tidak akan memiliki kekuatan legal dalam implementasinya.

Faktor teknis pendukung pun sangat penting untuk diperhatikan, apakah infrastruktur *hardware* pada user sudah memadai, apakan *software* pendukung sudah memadai dan operating sistem pada *user* sudah siap, apakah jaringan yang menghubungkan node-node SKPD sudah berjalan dengan baik, apakah *server* secara teknis sudah bisa mendukung jalannya sistem ini. Dalam pembangunan sistem ini telah

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

disepakati sebelumnya bahwa pekerjaaan akan dibagi kedalam dua fase, hal ini untuk kebutuhan yang sangan mendesak, fase satu akan dikerjakan dengan konsep *Ravid Application Development* (RAD), sedangkan fase dua akan dilaksanakan sesuai dengan konsep *software development* yang baku. Pada fase satu, sistem akan mendapat input dalam bentuk *file*, kemudian *file* akan dikategorisasikan dan disimpan dalam wadah *file management*, kemudian *file* ini akan disajikan sebagai informasi bagi yang membutuhkan dengan cara di *download*. Pada fase ini tidak terjadi *prosesing* terhadap data (isi *file*).

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengambil judul ” **Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Data dalam Penyusunan Laporan Mengenai Retribusi Daerah di Dinas Perhubungan Kota Bandung**”.

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk mempermudah proses pembahasan penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana program yang dilaksanakan yang dapat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan sistem informasi manajemen data dalam penyusunan laporan mengenai retribusi Daerah di Dinas Perhubungan Kota Bandung?
2. Bagaimana target dan sasaran implementasi kebijakan sistem informasi manajemen data dalam penyusunan laporan mengenai retribusi Daerah di Dinas Perhubungan Kota Bandung?
3. Bagaimana unsur pelaksana dalam implementasi kebijakan sistem informasi manajemen data dalam penyusunan laporan mengenai retribusi Daerah di Dinas Perhubungan Kota Bandung?
4. Bagaimana pengaruh faktor lingkungan dalam menjalankan implementasi kebijakan sistem informasi manajemen data dalam penyusunan laporan mengenai retribusi Daerah di Dinas Perhubungan Kota Bandung?

1.3 Maksud dan Tujuan laporan KKL

Maksud dari laporan ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan sistem informasi manajemen data dalam penyusunan laporan mengenai retribusi Daerah di Dinas Perhubungan Kota Bandung.

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Adapun tujuan laporan KKL ini adalah :

1. Untuk mengetahui program yang dilaksanakan yang dapat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan sistem informasi manajemen data dalam penyusunan laporan mengenai retribusi Daerah di Dinas Perhubungan Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui target dan sasaran implementasi kebijakan sistem informasi manajemen data dalam penyusunan laporan mengenai retribusi Daerah di Dinas Perhubungan Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui unsur pelaksana dalam menjalankan implementasi kebijakan sistem informasi manajemen data dalam penyusunan laporan mengenai retribusi Daerah di Dinas Perhubungan Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui pengaruh faktor lingkungan dalam menjalankan implementasi kebijakan sistem informasi manajemen data dalam penyusunan laporan mengenai retribusi Daerah di Dinas Perhubungan Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Laporan KKL

Kegunaan dari laporan ini adalah :

1. Bagi kepentingan penulis, dengan adanya laporan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang proses pelaksanaan pelaporan mulai dari pencarian masalah sampai dengan selesai dan juga sebagai ajang implementasi ilmu dan teori yang didapatkan selama perkuliahan

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

2. Guna teoritis, dalam rangka mengembangkan konsep-konsep atau teori-teori melalui penelitian ke lapangan. Dimana dalam laporan ini, diharapkan akan memberikan sumbangan ilmu serta dapat dijadikan bahan tinjauan awal untuk melakukan penelitian serupa dimasa yang akan datang.
3. Guna praktis, untuk memberikan masukan dan kritikan yang membangun bagi Dinas Perhubungan diharapkan dapat mengaplikasikan teori-teori yang sesuai dengan proses pelaksanaan sistem informasi manajemen data dalam pengelolaan data sumber-sumber pendapatan Daerah.

1.5 Kerangka Pemikiran

Implementasi dimaksudkan membawa ke suatu hasil (akibat) melengkapi dan menyelesaikan. Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu. Pressman dan Wildavsky mengemukakan bahwa : "*implimentation as to carry out, accomplish, fullfil, produce, complete*" maksudnya : membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi (Pressman dan Wildavsky,1978:21).

Implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Apabila dikaitkan dengan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan kebijakan publik yang

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

Kebijakan publik merupakan rangkaian keputusan yang mengandung konsekuensi moral yang didalamnya adanya keterkaitan akan kepentingan rakyat banyak dan keterikatan tanah air atau tempat dimana yang bersangkutan berada. Dan hal ini seyogyanya direfleksikan dalam perilaku aparat sebagai penyelenggara, dan adanya interaksi antara penguasa dengan rakyat.

Anderson mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah (Anderson,1978:3).

Menurut Edwards dan Sharkansky dalam Islamy bahwa kebijakan publik :

> "Dapat ditetapkan secara jelas dalam bentuk perundangan, pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun dalam bentuk program-program, proyek-proyek dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah".(Edwards dan Sharkansky dalam Islamy,1992:18-19).

Dari uraian di atas dapat diperoleh gambaran bahwa dengan adanya tujuan yang ingin direalisasikan dan adanya masalah publik yang harus diatasi, maka pemerintah perlu membuat suatu kebijakan publik. Kebijakan ini untuk keberhasilannya tidak hanya didasarkan atas prinsip-prinsip ekonomis, efesiensi dan administratif, akan tetapi juga harus didasarkan atas pertimbangan etika dan moral.

Level dan isi kebijakan akan mempengaruhi terhadap efektivitas implementasi kebijakan, yang pada giliranya akan mempengaruhi pola-pola interaksi (*pattern of interactions*) kelompok masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan.

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Berdasarkan pengertian implementasi diatas, Smith mengemukakan beberapa hal komponen-komponen model sistem implementasi yang dikutip Tachjan yaitu :

1. Program (kebijakan) yang dilaksanakan.
2. Target group dan sasaran.
3. Unsur pelaksana (*implementor*).
4. Faktor lingkungan.
   (Smith dalam Tachjan, 2006:37).

Keempat variabel tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan suatu kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbal balik, oleh karena itu terjadi ketegangan-ketegangan (*tensoins*) yang bisa menyebabkan timbulnya protes-protes, bahkan aksi fisik dimana hal ini menghendaki penegakan institusi-institusi baru untuk mewujudkan sasaran kebijakan tersebut.

Daerah mempunyai kewenangan dan keleluasan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk melaksanakan otonomi Daerah diperlukan dana atau pembiayaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan Daerah. Menurut Widjaja dalam bukunya otonomi Daerah menyebutkan yang dimaksud keuangan daerah adalah:

> “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam rangka APBD”.(Widjaja,1985:147).

Secara garis besar bahwa yang dimaksud dengan keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam pelaksanaan pemerintahan diDaerahnya. Hak dan kewajiban itu haruslah berupa kekayaan dalam membiayai APBD. Keuangan Daerah terdiri dari

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

beberapa komponen, pendapatan asli Daerah merupakan salah satu sumber-sumber keuangan Daerah.

Melengkapi teori tentang Sistem Informasi Manajemen Data maka akan di uraikan mengenai pengertian sistem, informasi dan manajemen. Secara sederhana sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur atau variabel yang terorganisasi. Suradinata menjelaskan bahwa, sistem merupakan suatu himpunan komponen atau variabel yang terorganisasi satu sama lain yang terpadu (*integrate*) serta tidak dapat dipandang sebagai suatu komponen yang terpisah (Suradinata,1996: 3).

Adanya komponen sistem yang saling berinteraksi dan bekerjasama membentuk suatu kesatuan yang mempunyai sifat-sifat sistem. Secara umum komponen tersebut dikenal dengan sub sistem masukan, keluaran, pengolahan dan umpan balik.

Informasi sering disamakan artinya dengan data padahal sebenarnya informasi berbeda dengan data. Ada perbedaan prinsipil antara data dan informasi, data merupakan bahan baku yang harus diolah sedemikian rupa sehingga berubah sifatnya menjadi informasi. Grudnitski mengemukakan bahwa informasi adalah sebagai data yang telah diletakan dalam konteks yang lebih berarti dan berguna yang dikomunikasikan pada penerima untuk digunakan dalam pembuatan keputusan (Grudnitski,1986:3).

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Stair menjelaskan bahwa Sistem Informasi berbasis komputer dalam suatu organisasi terdiri dari komponen-komponen berikut:

a. *Hardware*.
b. *Software*
c. *Database.*
d. Telekomunikasi.
e. Manusia.
f. Produser.
(Stair,1992:17).

Sistem sebagai kumpulan/*group* dari subsistem/bagian/komponen apapun baik pisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama sevara harmonis untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan informasi didefinisikan sebagai hasil pengelolaan data yang berarti dan bermanfaat. Dapat kita tarik suatu definisi baru dari sistem informasi sebagai kumpulan dari subsistem apapun baik pisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan yaitu mengolah data menjadi informasi yang berarti dan berguna.

Sistem Informasi menurut Laudon sebagai berikut :

> “Merupakan komponen-komponen yang saling berhubungan dan saling bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan dan menyebarkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, pengendalian dan untuk memberikan gambaran aktivitas dalam perusahaan”.(Laudon, 2004:55).

Sistem Informasi merupakan komponen-komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi tersebut untuk mendukung proses pengambilan keputusan, koordinasi dan pengendalian.

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Manajemen sebagai penggerak dan pengendali suatu organisasi sangat tergantung kepada informasi yang diterimanya. Keputusan yang harus diambil saat melaksanakan fungsinya akan sulit dilakukan seandainya manajemen tersebut tidak mendapatkan informasi yang mencerminkan keadaan sebenarnya.

Azhar Susanto berpendapat bahwa Sistem Informasi Manajemen adalah :

> "Merupakan kumpulan dari sub-sub sistem yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan yaitu mengolah data menjadi informasi yang diperlukan oleh manajemen dalam proses pengambilan keputusan saat melaksanakan fungsinya". (Susanto, 2004:68).

Jadi sistem informasi manajemen memiliki fungsi untuk merencanakan, menyusun (mengorganisir), menempatkan, mengarahkan dan mengendalikan apakah rencana yang dibuat telah terealisasi dengan baik yang bertujuan untuk pengambilan keputusan.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dibuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan yaitu menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu dan berdampak terhadap sesuatu. selain itu, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu/pejabat-pejabat/kelompok-kelompok pemerintah atau swasta demi tercapainya tujuan yang digariskan dalam kebijakan. Implementasi kebijakan juga dapat diartikan sebagai kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan pemerintah, baik usaha administrasi atau

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

untuk menimbulkan dampak pada masyarakat.

a) Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam memperjelas fungsi dari sistem informasi manajemen data yang ada yaitu dengan mengadakan pelatihan terhadap aparatur dinas yang dianggap ahli dibidang ini.
b) Target yang dibidik oleh Dinas Perhubungan adalah menjadikan sistem informasi manajemen data ini sebagai sistem perumusan data yang efektif dan efisien dalam menghadapi gempuran globalisasi yang menuntut segala sesuatunya dengan serba instant namun tetap menjunjung tinggi kualitas.
c) Unsur pelaksana sistem informasi manajemen data yang terdapat pada Dinas Perhubungan dianggap sudah sangat lengkap dan mumpuni untuk menjalankan kegiatan pengolahan data secara *online*.
d) Pengaruh faktor lingkungan sangatlah terasa dalam perkembangan sistem data di Dinas Perhubungan Kota Bandung.ini disebabkan karena data tentang retribusi yang tidak stabil dikarenakan perbedaan pendapatan perharinya. Dana retribusi ini bukanlah dana stabil yang mudah untuk dikalkulasikan.

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

2. Sistem informasi manajemen data

Sistem informasi manajemen data yaitu sebuah sistem manusia/mesin yang terpadu (*intregeted*) untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah dinas. Sistem ini menggunakan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak **(***software***)** komputer, prosedur pedoman, model manajemen dan keputusan, dan sebuah **"***data base***".**

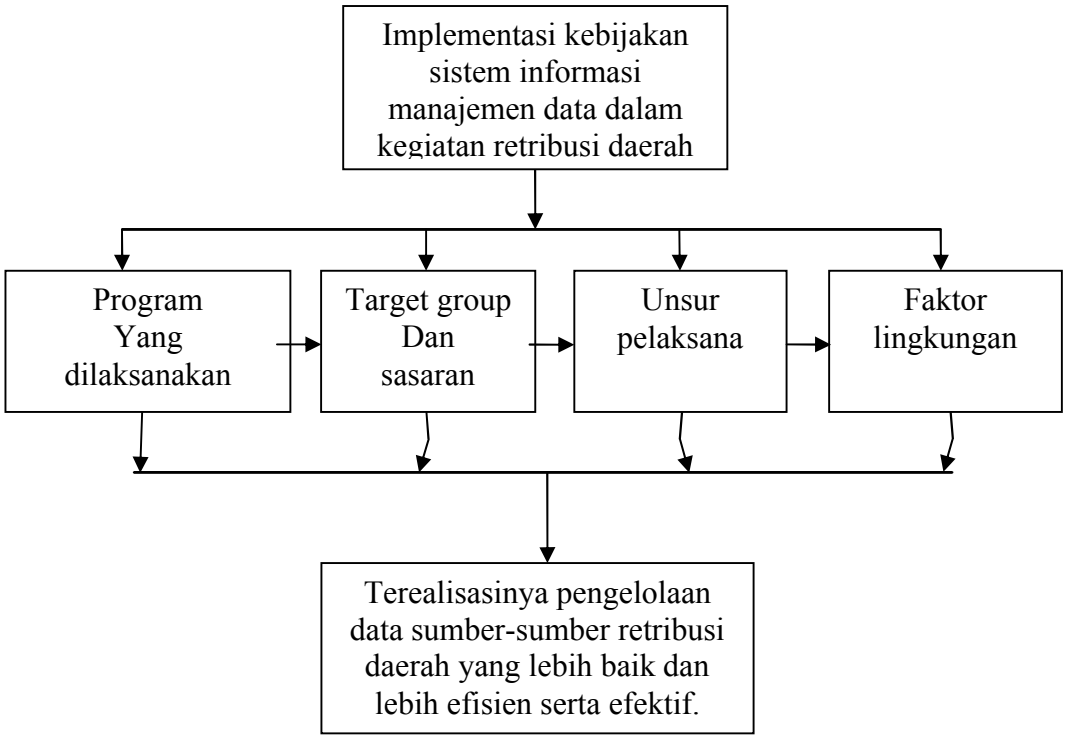
3. Retribusi daerah

Retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia tidak akan dikenakan iuran itu. Lebih lanjut diuraikan pula definisi dan pengertian yang berkaitan dengan retribusi yaitu retribusi adalah semua bayaran yang dilakukan bagi perorangan dalam menggunakan layanan yang mendatangkan keuntungan langsung dari layanan itu lebih lanjut dikatakan bahwa distribusi lebih tepat dianggap pajak konsumsi dari pada biaya layanan; bahwa retribusi hanya menutupi biaya operasional saja.

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Adapun model kerangka pemikiran sebagai berikut:

Bagan 1.1
Model Kerangka Pemikiran



1.6 Metode Penulisan Laporan KKL

Metode penulisan yang digunakan dalam laporan ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai berikut :

> "Penyelidikan deskriptif menuturkan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, suatu hubungan kegiatan, pandangan, sikap yang nampak, tentang satu proses yang sedang berlangsung, pengaruh yang sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, kecenderungan yang nampak, pertentangan yang meruncing". (Surakhmad, 1998 : 139)

metode deskiptif adalah metode yang digunakan untuk mendata atau mengelompokan sederet unsur yang terlihat sebagai pembentuk suatu bidang persoalan yang ada. Informasi deskriptif dalam kegiatan ilmiah akan memperlihatkan bahwa jalan dari suatu fakta menuju suatu fakta ilmiah adalah sebuah jalan yang sadar.

1.6.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam laporan kuliah kerja lapangan ini adalah :

1. Observasi, melakukan pengamatan atas perilaku seseorang dengan mendengarkan berbagai ucapan mengenai berbagai ragam soal pada aparatur pemerintahan. Pengamatan dilakukan terhadap Kepala Seksi Data dan Informasi Dinas Perhubungan Kota Bandung, mengenai bagaimana kewenangan kewenangan yang diberikan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi baik dalam pengumpulan data dari tiap SKPD atau dalam mengoperasionalkan sistem.

2. Studi Pustaka, mencari, memilah dan membaca buku-buku, majalah, surat kabar yang berhubungan dengan usaha-usaha dalam pengelolaan data sumber-sumber pendapatan Daerah.

1.6.2 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam laporan ini adalah *Purposive* (pengambilan informan berdasarkan tujuan) teknik ini adalah siapa yang akan diambil sebagai anggota informan diserahkan pada pertimbangan pengumpul data yang sesuai dengan maksud dan tujuan laporan. Menurut James A. Black teknik sampling Purposive adalah:

> "Teknik Sampling *Purposive* adalah salah satu cara yang diambil peneliti untuk memastikan, bahwa unsur tertentu dimasukan ke dalam sampel. Tingginya tingkat selektivitas yang ada pada teknik ini akan menjamin semua tingkatan yang relevan direpresentasikan dalam rancangan penelitian tertentu". (Black,2001:264).

Sampel *Purposive* sering disebut sampel *judgmental* karena penulis menguji pertimbangan-pertimbangan untuk memasukan unsur yang dianggap khusus dari suatu populasi tempat ia mencari informasi. Informan dalam penulisan ini terdiri dari informan yang berkaitan dengan pelaksana pengelola data sumber pendapatan Daerah di Dinas Perhubungan Kota Bandung.

Informan yang berkaitan dengan pengelolaan data sumber pendapatan Daerah yaitu :

1. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung. Penulis ingin mengetahui bagaimana aturan atau kebijakan yang diberikan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung terhadap aparaturnya dalam menjalankan tugasnya yang berkaitan dengan pengelolaan data sumber-sumber pendapatan Daerah.
2. Kepala Seksi data dan informasi. Penulis ingin mengetahui bagaimana kepala seksi dalam merumuskan atau mengatur kewenangan serta mengatur (*manage*) dalam menjalankan atau mengoperasionalkan sebuah Sistem Informasi Manajemen Data.
3. Aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandung. penulis ingin mengetahui bagaimana cara mengoperasionalisasikan Sistem Informasi Manajemen data serta ingin mengetahui kendala apa yang dapat terjadi dalam menggunakan sistem ini.
4. Masyarakat Kota Bandung. Penulis ingin mengetahui bagaimana peran serta masyarakat dalam mendukung program Pemerintah Kota Bandung.

3.6.3 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang sesuai dengan penulisan laporan ini adalah analisa deskriftif kualitatif dapat diartikan sebagai strategi penyelidikan yang naturalistis dan induktif dalam mendekati suatu suasana (*Setting*) tanpa hipotesis-hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya. Teori muncul dari pengalaman kerja lapangan dan berakar (*grounded*) dalam data (Suyanto,2005:183).

Analisis data yang digunakan dalam penulisan laporan ini menggunakan pendekatan kualitatif. penulisan kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna sesuatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu. Secara operasional teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan sebagaimana model analisis data.

Pertama, reduksi data didapat di lapangan langsung di ketik atau ditulis langsung dengan rapi, terperinci secara sistematis setiap selesai mengumpulkan data. Laporan itu harus dianalisis sejak dimulainya penulisan, laporan perlu di reduksi. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencari jika sewaktu-waktu diperlukan.

Kedua, *display* data data yang semakin bertumpuk itu kurang dapat memberikan gambaran secara menyeluruh. Oleh sebab itu diperlukan *display* data. *Display* data ialah menyajikan data dalam bentuk matrik, atau grafik, dan sebagainya. Dengan demikian, penulis dapat menguasai data dan tidak terbenam dengan setumpuk data.

Ketiga, pengambilan keputusan dan verifikasi berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul dan hipotes. Jadi dari data yang didapat mencoba untuk mengambil kesimpulan.

Laporan kuliah kerja lapangan kualitatif dikatakan ilmiah jika persyaratan validitas, reliabilitas, dan objektivitasnya sudah terpenuhi. Oleh sebab itu, selama proses analisis hal-hal tersebut selalu mendapat perhatian.

1.7 Lokasi dan Jadwal KKL

Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dilaksanakan pada Tanggal 1 Agustus 2010 s.d 1 September 2010. Bertempat di Dinas Perhubungan Kota Bandung yang ber alamat di Jl. R.E Martadinata no. 205, Bandung.

Tabel 1.1
Jadwal Laporan KKL

No.	Waktu dan Kegiatan	Juni 2010	Juli 2010	Agustus 2010	Sep 2010	Okt 2010	Nov 2010
1	Penyusunan Laporan KKL	■					
2	Mengurus surat izin		■				
3	Pengumpulan data dilapangan			■			
4	Pengolahan data				■		
5	Analisa data					■	
6	Sidang ujian Kuliah Kerja Lapangan						■

Kebijakan dapat dilihat sebagai konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja (Graycar, Dikutip Donovan dan Jackson dalam Keban, 2004: 55).Sebagai suatu konsep *filosofis*, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan; sebagai suatu *produk*, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi; sebagai suatu *proses*, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya.

Menurut Friedrick (dalam Kismartini, 2005: 1.5) mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan definisi di atas, berarti pemerintah harus mempunyai kemampuan yang dapat diandalkan untuk merespon dan menanggulangi permasalahan yang ada dengan memperhatikan sumberdaya yang dimiliki serta menerima masukan dari seseorang/kelompok, sehingga ada jalan keluar yang terbaik dan dihasilkan melalui proses yang fair.

Dunn (dalam Dwidjowijoto, 2007: 11) menjelaskan tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Fase *penyusunan agenda,* di mana para pejabat baik yang dipilih lewat pemilu maupun diangkat mengangkat isu tertentu menjadi agenda publik.
2. Fase *formulasi kebijakan*, di mana di dalamnya pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah yang dirumuskan.
3. *Adopsi kebijakan;* di sini alternatif kebijakan dipilih dan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas dan/atau konsensus kelembagaan.
4. *Implementasi kebijakan*, yang di dalamnya kebijakan yang diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi dengan memobilisasi sumberdaya yang dimilikinya, terutama finansial dan manusia.
5. *Penilaian kebijakan*; di sini unit-unit pemeriksaan dan akuntasi menilai apakah lembaga pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan telah memenuhi persyaratan pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

Menurut Chander dan Plano (1988:107) dalam Keban (2004: 56) kebijakan public adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya - sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah - masalah publik atau pemerintah. Kebijakan yang diambil telah banyak membantu para pelaksana ditingkat birokrasi pemerintah maupun para politisi untuk memecahkan masalah-masalah publik.

Sementara itu Islamy (dalam Kismartini, 2005:1.8) telah mengumpulkan beberapa pengertian kebijakan publik, seperti pendapat Thomas R. Dye, George C, Edwards dan Ira Sharkansky, James Anderson dan David Easton), terdapat beberapa sudut pandang dari para ilmuwan administrasi publik yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1)*Kebijakan publik dipandang sebagai tindakan pemerintah.* Thomas R. Dye, mengemukakan kebijakan publik sebagai "apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan". Dalam upaya mencapai tujuan negara, pemerintah perlu mengambil pilihan langkah tindakan yang dapat berupa melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu. Tidak melakukan sesuatu apa pun merupakan suatu kebijakan publik karena merupakan upaya pencapaian tujuan dan pilihan tersebut memiliki dampak yang sama besarnya dengan pilihan langkah untuk melakukan sesuatu terhadap masyarakat. Senada dengan pandangan Dye adalah George C. Edwards III dan Ira Sharkansky, yaitu : Kebijakan publik adalah "apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk *policy statement* yang berbentuk pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindak lanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah".

Sementara itu, James E. Anderson memberikan definisi kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.

2) *Kebijakan publik dipandang sebagai pengalokasian nilai-nilai masyarakat yang dilakukan pemerintah.* Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan, mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah. Sedangkan David Easton mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat.

3) *Kebijakan publik dipandang sebagai rancangan program-program yang dikembangkan pemerintah untuk mencapai tujuan.* James E. Anderson mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Sementara itu, Edwards III dan Sharkansky mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah suatu tindakan pemerintah yang berupa program- program pemerintah untuk pencapaian sasaran atau tujuan.

Dwidjowijoto (2008:55) telah merumuskan definisi yang lebih sederhana, yaitu kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi.

Berdasarkan berbagai sudut pandang terhadap pengertian kebijakan publik di atas, tampaklah bahwa kebijakan publik hanya dapat ditetapkan pemerintah, pihak-pihak lain atau yang lebih dikenal dengan sebutan aktor-aktor kebijakan publik hanya dapat mempengaruhi proses kebijakan publik dalam kewenangannya masing-masing. Menurut Dye (dalam Kismartini, 2005: 1.9), hal ini disebabkan oleh 3 hal dari kewenangan yang dimiliki pemerintah, yaitu :

a) Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk memberlakukan kebijakan publik secara universal kepada publik yang menjadi sasaran (*target group*).

b) Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk melegitimasi atau mengesahkan kebijakan publik sehingga dapat diberlakukan secara universal kepada publik yang menjadi sasaran (*target graoup*).

c) Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan kebijakan publik secara paksa kepada publik yang menjadi sasaran (*target group*).

Sementara Broomley (1989:3) telah menyusun model kebijakan berdasarkan hirarkhi dalam pengambilan keputusan. Terdapat tiga tingkatan yang berkaitan dengan proses penyusunan kebijakan dalam kelembagaan yaitu tingkat kebijakan (*policy level*), tingkat organisasi (*organizational level*) dan tingkat operasional (*operational level*).

Pada tingkat kebijakan pernyataan umum dibahas dan diformulasikan oleh lembaga legislatif. Pada tingkat organisasi, kekuasannya dipegang oleh lembaga eksekutif dan selanjutnya tingkat operasional merupakan operasionalisasi kegiatan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi atau lembaga masing-masing sebagai petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis dari kebijakan untuk menghasilkan outcome yang diharapkan. Suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah harus mendapatkan respon positif dari masyarakat pengguna kebijakan.

Dalam tingkat operasional, ada anggapan bahwa ketika pemerintah membuat suatu kebijakan tertentu, maka kebijakan tersebut dengan sendirinya akan dengan mudah dapat dilaksanakan seperti apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dan hasilnya akan mendekati seperti apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Menurut Smith (dalam Wahab, 1997:100) pandangan demikian tidak seluruhnya benar sebab di negara-negara dunia ketiga, implementasi kebijakan publik justru merupakan batu sandungan terberat dan serius bagi efektivitas pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang sosial dan ekonomi. Hal ini juga ditegaskan oleh Dwidjowijoto (2008:436) bahwa implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena disini pada masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep muncul dilapangan.

2.2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran berbagai keputusan politik kedalam mekanisme prosedur secara rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan juga menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Lester dan Stewart (2000:104) dalam Winarno (2007:144) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan, dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan kebijakan. Implementasi mempunyai makna pelaksanaan perundang-undangan dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan atau program-program.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Menurut Dwidjowijoto (2008:432) bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua langkah pilihan yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Perda adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung operasional antara lain Keppres,

Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain.

Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*), maupun sebagai suatu hasil (*outcomes*). Sebagai suatu proses, implementasi dapat dilihat sebagai rangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan- keputusan kebijakan bisa dijalankan. Dalam konteks keluaran, implementasi melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapatkan dukungan, seperti tingkat belanja anggaran untuk suatu program. Pada tingkat abstraksi yang tertinggi, hasil implementasi mempunyai makna bahwa telah ada perubahan yang bisa diukur setelah kebijakan atau program diluncurkan.

Van Meter dan Van Horn (1975:477) (dalam Budi Winarno, 2002:102) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan- keputusan kebijakan. Jadi tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan

dan sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan- keputusan kebijakan.

Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno 2007:148) mengemukakan bahwa suatu kebijakan mungkin diimplementasikan secara efektif, tetapi gagal memperoleh hasil substansial karena kebijakan tidak disusun dengan baik atau karena keadaan-keadaan lainnya. Namun demikian, Wahab (1997:59) menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Selain itu terdapat kesenjangan yang ditemukan dalam implementasi kebijakan, yaitu suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai. Hasil penelitian *International Fund for Agricultural Development* (IFAD) melaporkan pentingnya implementasi kebijakan publik sebagaimana dikutip oleh Ismanto (dalam Bandoro, 1995:449), bahwa:

> Implementasi kebijakan lebih-lebih di negara yang berkembang tidak hanya sekedar persoalan teknis administratif yaitu menterjemahkan suatu kebijakan kedalam program-program yang lebih spesifik, tetapi proses implementasi juga merupakan proses yang pelik yang sangat dipengaruhi oleh sifat kebijakan *(content of policy)* dan lingkungan dimana kebijakan tersebut diimplementasikan *(content of implementation).*

2.3. Sistem Informasi Manajemen Data

Informasi dapat diibaratkan sebagai darah yang mengalir di dalam tubuh manusia. seperti halnya informasi di dalam , sebuah SKPD atau Dinas yang sangat penting untuk mendukung kelangsungan perkembangannya, sehingga terdapat alasan bahwa informasi sangat dibutuhkan bagi sebuah Dinas. Akibat bila kurang mendapatkan informasi, dalam waktu tertentu, Dinas akan mengalami ketidakmampuan mengontrol sumber daya, sehingga dalam mengambil keputusan-keputusan strategis sangat terganggu. Disamping itu, sistem informasi yang dimiliki seringkali tidak dapat bekerja dengan baik.

Masalah utamanya adalah bahwa sistem informasi tersebut terlalu banyak informasi yang tidak bermanfaat atau berarti (sistem terlalu banyak data). Memahami konsep dasar informasi adalah sangat penting (vital) dalam mendesain sebuah sistem informasi yang efektif *(effective business system)*. Menyiapkan langkah atau metode dalam menyediakan informasi yang berkualitas adalah tujuan dalam mendesain sistem baru.

Sebuah Dinas mengadakan transaksi-transaksi yang harus diolah agar bisa menjalankan kegiatannya sehari-hari. Daftar gaji harus disiapkan, penjualan dan pembayaran atas perkiraan harus dibutuhkan: semua ini dan hal-hal lainnya adalah kegiatan pengolahan data dan harus dianggap bersifat pekerjaan juru tulis yang mengikuti suatu prosedur standar tertentu.

Komputer bermanfaat untuk tugas-tugas pengolahan data semacam ini, tetapi sebuah sistem informasi menajemen melaksanakan pula tugas-tugas lain dan lebih dari sekedar sistem pengolahan data. Adalah sistem pengolahan informasi yang menerapkan kemampuan komputer untuk menyajikan informasi bagi manajemen dan bagi pengambilan keputusan.

Sistem informasi manajeman digambarkan sebagai sebuah bangunan piramida dimana lapisan dasarnya terdiri dari informasi, penjelasan transaksi, penjelasan status, dan sebagainya. Lapisan berikutnya terdiri dari sumber-sumber informasi dalam mendukung operasi manajemen sehari-hari. Lapisan keriga terdiri dari sumber daya sistem informasi untuk membantu perencanaan taktis dan pengambilan keputusan untuk pengendalian manajemen. Lapisan puncak terdiri dari sumber daya informasi untuk mendukung perencanaan dan perumusan kebijakan oleh tingkat manajemen.

Definisi sebuah sistem informasi manajemen, istilah yang umum dikenal orang adalah sebuah sistem manusia/mesin yang terpadu (*intregeted*) untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sistem ini menggunakan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) komputer, prosedur pedoman, model manajemen dan keputusan, dan sebuah "*data base*".

2.4. Retribusi Daerah

Dalam literatur-literatur mengenai keuangan negara dan keuangan daerah, terdapat banyak ahli yang mengajukan definisi dan peristilahan yang pada akhirnya merujuk pada suatu konsep yang dikenal sebagai retribusi daerah. Satu hal yang sangat jelas dalam membahas masalah retribusi daerah adalah sulitnya kesamaan pandangan mengenai apa yang termasuk dalam cakupan pembahasan mengenai hal ini. C. Kurt Zorn menegaskan bahwa:

One clear thing about user charges and fees is that there is a lack of agreement about what should be includes under rubric "user charges and fees (Satu hal yang jelas tentang retribusi dan biaya adalah bahwa ada kurangnya kesepakatan tentang apa yang harus termasuk di bawah rubrik "retribusi dan biaya)

Dalam satu sisi, retribusi merupakan semacam mekanisme pasar dalam sektor publik, dimana terjadi suatu transaksi antara pemerintah dengan warga masyarakat memiliki kaitan erat antara sejumlah uang yang dibayarkan dengan manfaat yang diterima. Dengan menggunakan pengertian ini, maka retribusi dapat mencakup:

Fees and charges, rents and royalties, earmarked excise taxes, permits and licenses … revenue from the sale of government property, interest on government loans, premium collected for disaster or other special insurance, receipts of public enterprises, the revenue raised from government created property right, and premiums or annuity payments for government retirement or health program (Tarif dan biaya, sewa dan royalti, pajak cukai disisihkan, izin dan lisensi pendapatan dari penjualan aset pemerintah, bunga atas pinjaman pemerintah, premi yang dikumpulkan untuk bencana atau asuransi khusus lainnya, penerimaan perusahaan publik, pendapatan yang diperoleh dari properti pemerintah dan premi atau pembayaran anuitas untuk pensiun pemerintah atau program kesehatan)

Retribusi juga dapat didefinisikan sebagai bagian dari suatu *beneficiary charges*. Dimana ia didefinisikan sebagai suatu bentuk pembayaran yang dilakukan oleh konsumen dalam suatu proses pertukaran tidak langsung dengan jasa layanan yang diberikan oleh pemerintah.

Termasuk dalam definisi ini adalah retribusi yang merupakan suatu bentuk pembayaran yang dapat dihindari jika tidak mengkonsumsi layanan tanpa memperhatikan apakah layanan yang diberikan berkarakteristik barang publik, lisensi dan perizinan yang merupakan pembayaran konsumen kepada pemerintah atas jasa yang diberikannya(seperti pengawasan dan pengaturan), serta *special assessment* yang secara langsung terkait dengan manfaat yang diterima dan berdampak atas kepemilikan suatu properti.

Sejalan dengan tujuan terciptanya sarana transportasi yang baik maka pelaksanaan pembangunan sektor ini diarahkan untuk :

1. Meningkatkan peranan sistem transportasi dalam memenuhi kebutuhan mobilisasi manusia, barang dan jasa.
2. Memperluas jaringan transportasi yang menjangkau seluruh wilayah.
3. Tersedianya pelayanan transportasi yang memadai guna mendukung industri, jasa perdagangan, pariwisata dan pertanian.

Selanjutnya melalui tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan yang mempunyai kewenangan teknis untuk menangani permasalahan dibidang perhubungan berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, maka Dinas Perhubungan Kota Bandung ditantang untuk mampu menghadapi permasalahan-permasalahan di masa yang akan datang melalui visi “Terwujudnya sistem transportasi kota yang lebih baik untuk mendukung Kota Bandung sebagai kota Jasa yang Bermartabat”.

3.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipakai sebagai landasan operasional Dinas Perhubungan Kota Bandung adalah sebagai berikut :

a. PERDA Kota Bandung No. 2 tahun 2001 tanggal 7 Maret 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom.

b. PERDA Kota Bandung No. 13 tahun 2007 tanggal 4 Desember 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung.
c. PERDA Kota Bandung No. 02 tahun 2008 tentang penyelenggaraan perhubungan di Kota Bandung
d. PERDA Kota Bandung No. 12 tahun 2008 tentang Pungutan Daerah di Bidang Perhubungan.
e. Peraturan Walikota No. 475 / 2008 tentang Tugas pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Dinas Daerah di lingkungan Pemda Kota Bandung.
f. Keputusan Walikota No. 1230 /2001 tentang Juknis pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor ,Penyelenggaraan Bengkel Umum, Lembaga Teknis Penguji,Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Mengemudi dan Kegiatan Bongkar Muat Barang Di Kota Bandung.
g. Keputusan Walikota Bandung No. 1714 Tahun 2001 tentang Petunjuk Penyelenggaran Perhubungan Di Kota Bandung

Peraturan Walikota Bandung Nomor 402 Tahun 2006 tentang Pembentukan Sub Unit Pengelolaan Terminal Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal Dinas Perhubungan Kota Bandung.

3.3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang Perhubungan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis lingkup lalu lintas dan parker, angkutan dan terminal, sarana dan operasional;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lalu lintas dan parkir, angkutan dan terminal, sarana dan operasional;
3. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang lalu lintas dan parkir, angkutan dan terminal, sarana dan operasional;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;
5. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Dinas.

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan :
    a) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
    b) Sub. Bagian Keuangan dan Program

3. Bidang Lalu lintas dan Parkir, membawahkan :
    a) Seksi Manajemen dan Rekayasa lalu lintas
    b) Seksi Tata Teknis Perparkiran
4. Bidang Angkutan dan Terminal, membawahkan :
    a) Seksi Bina Angkutan
    b) Seksi Tata Teknik Terminal
5. Bidang Sarana, membawahkan :
    a) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor
    b) Seksi Perbengkelan
6. Bidang Operasional, membawahkan :
    a) Seksi Penataan dan Pengendalian
    b) Seksi Bina Lalu lintas
7. UPT

3.4. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Bandung diuraikan sebagai berikut :

3.4.1. SEKRETARIAT

A. Data Pegawai

Karyawan Dinas Perhubungan Kota Bandung terdiri dari 362 PNS dan 141 orang CPNS dengan jumlah total sebanyak 503 pegawai.

Jumlah PNS berdasarkan Golongan :

1. Golongan IV : 7 Orang
2. Golongan III : 123 Orang
4. Golongan II : 301 Orang
5. Golongan I : 72 Orang

Jumlah PNS berdasarkan klasifikasi pendidikan :

1. Doktor : 1 Orang
2. Pasca Sarjana : 11 Orang
3. Sarjana : 60 Orang
4. Sarjana Muda / D3 : 9 Orang
5. D2 : 4 Orang
6. SLTA : 334 Orang
7. SLTP : 41 Orang
8. SD : 43 Orang

Esselonering Dinas Perhubungan :

Kepala Dinas (Eselon IIb) : 1 Orang

Sekretaris (Eselon IIIa) : 1 Orang

Kabid (Eselon IIIb) : 4 Orang

Kasubag (Eselon IVa) : 2 Orang

Kasie (Eselon IVa) : 8 Orang

Ka UPTD (Eselon IVa) : 3 Orang

Kasubag TU (Eselon IVb) : 3 Orang

B. Lingkup Keuangan dan Program

Penataan masalah keuangan yang mencakup berbagai kegiatan meliputi: Pengusulan, penerimaan, pengeluaran dan pengarsipan laporan-laporan income dari unit kerja penghasil, pembuatan laporan target dan realisasi income.

Sumber keuangan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung ada tiga , yaitu :

1) Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 16.719.089.993 dengan realisasi sebesar Rp. 15.759.541.206,- atau sebesar 94,26%
2) Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 15.526.523.400 dengan realisasi sebesar Rp. 13.454.074.295,- atau sebesar 86,65%
3) Anggaran Pendapatan dengan target sebesar Rp. 16.939.472.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 16.937.792.500,- atau sebear 99,99 %

Penataan masalah lingkup Keuangan dan Program yang mencakup :

1. Pembuatan Renja (Rencana Kerja) Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2010
2. Pembuatan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) tahun 2010
3. Pembuatan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) tahun 2010
4. Pembuatan DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) tahun 2010
5. Pembuatan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah) tahun 200

C. Lingkup Umum dan Kepegawaian

1. *Kegiatan Administrasi Umum, meliputi* :

   a. Telah melakukan pengelolaan surat masuk sebanyak 1.459 buah

   b. Telah melakukan pengelolaan surat keluar sebanyak 1.001 buah

   c. Pemeliharaan Kebersihan Kantor dan Taman

   d. Pendistribusian Barang ke setiap unit kerja di Dishub Kota Bandung

   e. Pelaksanaan Keprotokolan dan Kehumasan

   f. Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK)

   g. Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan

   h. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

   i. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

   j. Pelaburan Gedung Utama Termina Leuwi Panjang

   k. Pelaksanaan Rapat Dinas

   l. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

      1. Roda Empat sebanyak 32
      2. Roda dua sebanyak 54

   m. Mengikuti Lomba Kendaraan Hias dalam rangka HUT Kota Bandung

   n. Mengikuti Pameran di Braga City Walk dalam rangka HUT Kota Bandung

   o. Pengadaan Jasa Kebersihan Kantor

   p. Pengadaan Instalasi Listrik berupa kabel dan lampu

   q. Pemasangan CCTV di Terminal Leuwi Panjang

2. *Kegiatan Kepegawaian, meliputi :*

a. Telah menyelesaikan pembuatan Budzething Pegawai

b. Telah menyelesaikan Pembuatan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)

c. Telah menyelesaikan Pembuatan Penjagaan Kenaikan Pangkat

d. Telah menyelesaikan Pembuatan Penjagaan Gaji Berkala

e. Telah menyelesaikan Pembuatan Penjagaan Pensiun

f. Telah menyelesaikan pembuatan DP3 tahun 2008 bagi 523 orang PNS dan memproses pembuatan DP3 tahun 2009 di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Bandung

g. Telah menyelesaikan kenaikan pangkat regular berdasarkan PP No. 12 Tahun 2005 untuk periode April 2009 sebanyak 17 orang PNS dan periode Oktober 2009 sebanyak 10 orang PNS

h. Telah menyelesaikan permohonan pensiun bagi 24 orang PNS

i. Telah menyelesaikan kenaikan gaji berkala PNS periode bulan Januari s/d Desember 2009 sebanyak 153 orang

j. Telah melaksanakan tugas rutin yaitu :

(1). Pembuatan daftar hadir setiap akhir bulan

(2). Pembuatan daftar hadir apel pagi setiap hari

k. Memproses, menyiapkan dan menyelesaikan Surat Edaran, Surat Undangan, Surat Perintah sesuai dengan keperluan dalam menjalankan kegiatan dinas.

l. Mengajukan, memproses, menyiapkan berbagai jenis diklat / bintek :

I. Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) sebanyak 5 orang

II. Diklat Pra jabatan sebanyak 124 orang CPNS formasi 2007

m. Mengadakan penataan kearsipan pada bidang kepegawaian.

n. Telah menyelesaikan pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi tahun 2009 sebanyak 30 orang

Telah memproses pembuatan TASPEN bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2009 sebanyak 154 orang.

3.4.2. Bidang Operasional

1. Perumusan rencana pengaturan dan pengawasan teknis dalam pelaksanaan kebijaksanaan teknik operasional seluruh bidang perhubungan di lapangan
2. Melaksanakan dan menyiapkan bahan petunjuk tehknis pembinaan ketertiban lalu lintas, pengelolaan operasional lalu lintas angkutan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas dan angkutan.
3. Melaksakan pengendalian lalu lintas terutama di daerah-daerah rawan kemacetan. Dalam tahun 2006 Dishub Kota Bandung telah menugaskan sebanyak 5orang petugas di masing – masing 24 titik kemacetan yang terbagi di 3 wilayah (Bandung Barat, Bandung Tengah dan Bandung Timur).
4. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan masing-masing seksi.

Sebuah sistem terpadu berdasarkan pada anggapan bahwa harus ada integrasi antara data dan pengolahan. Integrasi data dicapai melalui "data base". Pada sebuah sistem pengolahan informasi, "data base" terdiri dari semua data yang dapat dijangkau oleh sistem. Pada SIM berdasarkan komputer, istilah "data base" biasanya dipakai khusus untuk data yang dapat dijangkau secara langsung oleh komputer. Manajemen sebuah "data base" adalah sebuah sistem perangkat lunak komputer yang disebut sebagai sebuah sistem manajemen "data base". Sesuatu penerapan yang mamakai sebuah item (butir) data akan mengambil item data yang sama, yang hanya sekali disimpan dan disediakan untuk semua penerapan. Suatu peremajaan dari sebuah item data membuatnya sesuai untuk semua pemakaian.

Pengolahan terpadu dicapai melalui sebuah perencanaan sistem secara menyeluruh. Biasanya sistem dirancang sebagai suatu gabungan beberapa subsistem dan bukan sebagai sebuah sistem tunggal. Perancangan sistem ini dapat berupa sebuah komputer pusat besar, atau dapat pula merupakan sebuah jaringan kerja beberapa komputer kecil. Gagasan pokoknya adalah paduan terencana dari berbagai penerapan yang layak dan efektif.

Kecenderungan dalam pengolahan transaksi pada sistem-sistem mutakhir adalah menuju pengumpulan data secara "online" dan permintaan informasi (*inquiry*) secara online pula. Kemampuan memperoleh informasi secara online sangat besar peranannya dalam

mendukung informasi. Ini berarti bahwa setiap petugas yang berwenang dapat memperoleh jawaban langsung atas sesuatu permintaan informasi seperti posisi terakhir perkiraan seorang pelanggan atau sediaan yang ada untuk jenis barang tertentu

sistem informasi manajemen data untuk retribusi daerah menggunakan sebuah aplikasi yang dikenal dengan nama SIMPATDA adalah Software yang diperuntukan bagi pemerintahan,guna menunjang kinerja yang berhubungan dengan pendapatan & retribusi daerah sehingga dapat tertata dengan rapih sampai sejauh mana PAD dapat dicapai.

EXECUTIVE SUMARRY SIMPATDA adalah Software yang diperuntukan bagi pemerintahan khususnya Pemerintahan Daerah,guna menunjang kinerja yang berhubungan dengan pendapatan Pajak & retribusi daerah sehingga pendapatan daerah dapat tertata dengan rapih guna tercapainya peningkatan PAD.

Sistem dan prosedur administrasi pendapatan daerah yang terdiri dari Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintaah Kabupaten/ Pemerintah Kota yang menjadi tugas dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota.

Software ini melingkupi pekerjaan yang terdiri dari :

1) Pendaftar Identitas Wajib Pajak/ Wajib Retribusi,
2) Mendata objek pajak/ retribusi,
3) Memproses penghitungan pajak yang harus dibayar ,
4) Penerimaan pembayaran oleh Bendahara,
5) Menu pelaporan.

6) Administrasi penagihan terhadap wajib pajak/retirbusi yang belum menyelesaikan kewajiban pembayaran Modul-Modul Aplikasi SIMPATDA
7) Informasi dan Keberatan
8) Penetapan dan Benda Berharga
9) Pembayaran dan Penyetoran PAJAK KABUPATEN
10) Pajak Hotel
11) Pajak Restoran
12) Pajak Hiburan
13) Pajak Reklame
14) Pajak Penerangan Jalan
15) Pajak Parkir PAJAK PROPINSI
16) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air
17) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan PAJAK PUSAT
18) Pajak Bumi dan Bangunan
19) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
20) Pajak Penghasilan
21) Pajak Pertambahan Nilai Barang
22) Tata Cara Pajak RETRIBUSI KABUPATEN
23) Retribusi Ijin Gangguan
24) Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan
25) Retribusi Layanan Kesehatan

26) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Retribusi Pelayanan Persampahan

27) Retribusi Pemeriksaan Alat PMK

28) Retribusi Rumah Potong Hewan

29) Retribusi Ijin Usaha

30) Retribusi Pengujian Mutu Hasil

31) Retribusi Pelayanan Ketenaga Kerjaan - Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Capil

32) Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum

33) Retribusi Pelayanan Pasar

34) Retribusi Terminal

35) Retribusi Tempat Khusus Parkir

36) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

37) Retribusi Ijin Trayek

38) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air

.

4.2. Target dan Sasaran Sistem Informasi Manajemen Data dalam penyusunan laporan retribusi Daerah.

Tujuan perencanaan strategis adalah untuk mengembangkan strategi dimana suatu organisasi akan mampu mencapai tujuannya. Horison waktu untuk perencanaan strategis cenderung lama, sehingga perubahan mendasar dalam organisasi bisa diadakan. Aktifitas perencanaan strategis tidak harus terjadi dalam suatu siklus periode seperti kegiatan pengendalian manajemen.

Kegiatan ini memang agak tidak teratur, meskipun beberapa perencanaan strategis bisa dijadwalkan ke dalam perencanaan tahunan dan siklus penganggaran. Beberapa jenis data yang berguna dalam perencanaan strategis menunjukkan ciri data :

a. Prospek ekonomi bagi bidang kegiatan organisasi dewasa ini.
b. Lingkungan politik dewasa ini dan perkiraan masa mendatang
c. Kemampuan dan prestasi organisasi menurut pasaran, negara, dan sebagainya (berdasarkan kebijakan dewasa ini).
d. Proyeksi kemampuan dan prestasi masa mendatang menurut pasaran, negara, dan sebagainya (berdasarkan kebijakan dewasa ini).
e. Prospek bagi SKPD di daerah lain.
f. Kemampuan bersaing
g. Peluang bagi karya usaha baru.
h. Alternatif strategi

Dukungan sistem informasi untuk perencanaan strategis tidak bisa selengkap seperti bagi pengendalian manajemen dan pengendalian operasional. Namun demikian sistem informasi manajemen dapat memberi bantuan yang cukup pada proses perencanaan strategis, misalnya:

a. Evaluasi kemampuan yang ada didasarkan atas data internal yang ditimbulkan kebutuhan pengolahan operasional.

b. Proyeksi kemampuan mendatang dapat dikembangkan oleh data masa lampau dan diproyeksikan ke masa mendatang

c. Data internal dan eksternal yang mungkin bisa direkam dalam database komputer.

Implementasi dari penyelesaian (alternative keputusan) yang dipilih pada langkah sebelumnya, meliputi perencanaan dan mempersiapkan kegiatan yang harus dilaksanakan agar alternative penyelesaian tersebut betul-betul menyelesaikan masalah. Kurangnya perhatian terhadap langkah implementasi merupakan salah satu sebab utama, kenapa suatu alternatif penyelesaian yang baik sering kali tidak mampu menyelesaikan masalah yang seharusnya diselesaikan.

Dari pendapat bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketataan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang

terlibat, dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Fungsi implementasi itu ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan ataupun sasaran kebijakan negara diwujudkan sebagai hasil akhir kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebab itu, fungsi implementasi mencakup pula penciptaan apa yang dalam ilmu kebijakan negara disebut sistem penyampaian kebijakan negara yang biasanya terdiri dari cara atau sasaran tertentu yang dirancang secara khusus serta diarahkan menuju terciptanya tujuan dan sasaran yang dikehendaki.

Selain itu dapat diambil model demonstrasi sebagai metode untuk mengembangkan strategi bagi Dinas Perhubungan untuk memulai mengelola data. Menurut Smith, Stanley dan Shores, model demonstrasi dilaksanakan dalam dua bentuk, yakni :

1. Bentuk pertama, tim ahli di Dinas Perhubungan yang diorganisasi dalam kelompok melaksanakan suatu proyek pengembangan eksperimental. Unit ini melakukan pengembangan dan riset intemal dinas, yang bermaksud menghasilkan segmen baru dari data, lalu dipertunjukan kepada Kepala Dinas dengan harapan dapat diserap oleh dinas secara keseluruhan. Jadi model ini dimulai dan diorganisasi oleh hirarki administratif serta menyajikan suatu variasi model administrative perekayasaan data.

2. Bentuk kedua, model demonstrasi disusun kurang formal dibandingkan dengan model pertama. Beberapa orang tim ahli yang tidak puas terhadap data yang ada kemudian melakukan eksperimen dalam area tertentu dalam data dengan maksud menemukan altematif pelaksanaan model baru. Berdasarkan eksperimen ini diciptakan unit-unit model baru yang dinilai berhasil oleh suatu regu penelitian dan pengembangan informal dan kemudian diajukan untuk diserap oleh dinas.

Pengolahan data yang dihasilkan melalui proses ini telah diuji dalam situasi-situasi eksperimental, dan oleh karenanya menyediakan altematif pengolahan yang dapat dilaksanakan dalam praktek dan sistem Dinas. Perubahan dalam bentuk yang spesifik yakni segmen-segmen Pengolahan data yang dapat dilaksanakan.memudahkan untuk menghadapi hambatan yang sering terjadi bila hendak melakukan revisi secara menyeluruh (sistem yang luas)Hakekat model demonstrasi berskala kecil memudahkan terhadap inovasi pengolahan data untuk menghindarkan kesenjangan antara dokumen dan pelaksanaannya yang ada pada model administratif.Model demonstrasi khususnya menggerakkan inisiatif dan sumber aparatur dinas dan memberdayakan sumber-sumber administratif untuk memenuhi kebutuhan dan minat aparatur dalam upaya mengembangkan program-program baru.

Kerugian utama model demonstrasi ialah karena model ini menciptakan pertentangan-pertentangan dikalangan aparatur dinas ataupun tim ahli. Tim ahli yang tidak ikut serta dalam proses pengembangan pengolahan data cenderung menganggap tim ahli yang lain yang melakukan eksperimen dengan keraguan dan tidak yakin. Mereka menganggap kalaulah hasil eksperimen itu baik namun kelompok tersebut tidak terbimbing bahkan dianggap elit yang oportunistik. Perasaan dan sikap demikian pada gilirannya menghambat penyerapan terhadap inovasi sistem informasi pengolahan data. Karena itu suatu komponen yang penting pada model demonstrasi adalah perlu diadakannya komunikasi terbuka antara tim ahli yang melakukan eksperimen dengan pihak berwenang (misalnya kepala dinas yang terkait), yang bertujuan untuk mencegah rasa keraguan / rasa tidak diikutsertakan, sebaiknya kelompok penguji melakukan serangkaian demonstrasi hasil-hasil pekerjaan mereka untuk memuaskan berbagai pihak

Istilah pengelolaan diasumsikan sebagai kegiatan untuk mencapai tujuan berdasarkan rencana yang telah dibuat sehingga jalannya kegiatan yang mendapat pengelolaan akan terkontrol dengan baik. Mekanisme ini sering dipakai oleh perusahaan swasta yang bergerak baik di sektor jasa maupun industri ataupun badan pemerintah dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan negara.

4.3. unsur pelaksana Sistem Informasi Manajemen Data dalam penyusunan laporan retribusi daerah.

Perkembangan teknologi di bidang perangkat keras komputer mendukung perkembangan globalisasi informasi. Dari komputer yang tadinya merupakan komputer milik segelintir pemakai dengan kemesteriusannya (besar, sulit dioperasikan, dalam ruang khusus, perlu operator, dll) menjadi komputer yang semakin hari semakin kecil bahkan menjadi komputer pribadi, yang dapat diletakkan bersama barang lain dengan cara yang nyaman, bahkan bisa "berbicara" (mengeluarkan suara). Hal ini mengakibatkan komputer semakin digunakan diberbagai bidang. Bahkan saat ini, hampir semua tawaran lowongan pekerjaan di bidang apapun di beberapa tingkatan pekerjaan memasyarakatkan penguasaan akan komputer (*computer literate)* dan sistem yang akan mempengaruhi dalam setiap pekerjaan yang akan dikerjakan.

Sistem merujuk pada sejumlah karakteristik yang sama (*common characteristics*). Merujuk pada teori sistem, karakteristik yang sama itu adalah sebagai berikut:

1. Sistem memiliki struktur
2. Sistem merupakan jeneralisasi dari realitas
3. Sistem cenderung berfungsi dengan cara yang sama . Sistem bekerja dengan melibatkan masukan dan keluaran dengan mana berlangsung suatu proses aktifitas dari sistem, yang kemudian menghasilkan perubahan-perubahan

4. Ragam bagian dari suatu sistem memiliki fungsi-fungsi tertentu, dan demikian pula halnya dengan adanya hubungan-hubungan struktural, yang juga terbentuk dalam hubungan fungsional tertentu
5. Karena adanya hubungan fungsional antar bagian-bagian dari sistem, maka berlangsunglah aliran atau transfer atas substansi tertentu
6. Sistem juga mempertukarkan enerji atau substansi tertentu dengan sistem yang lebih besar
7. Adanya hubungan fungsional adalah karena adanya kekuatan pengendali
8. Bagian-bagian akan mengarah pada taraf integrasi, dalam arti bagian-bagian bekerja dalam situasi kebersamaan

Ini menyebabkan suatu sistem berada pada suatu situasi berikat (*boundary*). Situasi itu ditandai dengan adanya suatu kesatuan sistem. Pada setiap sistem selalu terdapat tiga properti (*property)* , yaitu:

a) Elemen (elemen) yang menjadi penopang adanya sistem itu
b) Atribut (*attributes*), yakni karateristik dari elemen sistem yang dapat diamati dan diukur. Di dalam contoh suatu sistem politik atau sistem pemerintahan maka dapat teridentifikasi hal-hal seperti adanya sejumlah penduduk, sejumlah entitas pemerintahan daerah, luas wilayah yang menjadi batasan dari satu sistem pemerintahan dan lain-lain;

c) Hubungan (*relationships*) yakni hubungan-hubungan yang timbul di antara elemen pada suatu sistem. Hubungan-hubungan ini didasarkan pada adanya sebab dan akibat.

Sistem informasi telah berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan terbukti sangat berperan dalam kegiatan perekonomian dan strategi penyelenggaraan pembangunan. Keberadaan sistem informasi mendukung kinerja peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas organisasi pemerintah dan dunia usaha, serta mendorong pewujudan masyarakat yang maju dan sejahtera.

Sistem informasi yang dibutuhkan, dimanfaatkan, dan dikembangkan bagi keperluan pembangunan daerah adalah sistem informasi yang terutama diarahkan untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah. Hal ini perlu diingat karena telah terjadi perubahan paradigma menuju desentralisasi di berbagai aspek pembangunan. Informasi merupakan dasar yang penting bagi organisasi dan manajemen. Oleh sebab itu, arsiparis perlu mengetahui dasar-dasar informasi dalam melaksanakan kegiatan arsip. Informasi merupakan hasil olahan dari sejumlah data melalui sistem informasi manajemen. Data merupakan kumpulan dari sejumlah fakta. Informasi sangat dibutuhkan oleh pihak manajemen dalam pembuatan keputusan. Untuk itu, tiap tingkatan manajemen membutuhkan informasi sesuai dengan kewenangan pembuatan keputusan.

Tingkatan manajemen terdiri dari tingkatan manajemen atas, menengah dan bawah. Informasi mempunyai karakteristik dan tipe-tipe informasi. Kebutuhan tiap tingkatan manajemen terhadap informasi berbeda-beda sesuai dengan karakteristik dan tipe informasi yang diperlukan dalam pembuatan keputusan. Dalam era globalisasi, pendekatan sistem informasi dapat dipilah menjadi tiga pendekatan, antara lain: pendekatan teknis, pendekatan perilaku dan pendekatan sosioteknis.

Sistem informasi ada pada setiap organisasi modern. Untuk kebutuhan akses informasi eksternal maka organisasi membutuhkan sistem informasi yang mencakup pemasok dan pelanggan. Untuk kebutuhan internal, maka sistem informasi diterapkan sesuai dengan fungsi-fungsi dalam organisasi tersebut. Pada hakikatnya, unit-unit organisasi tersebut merefleksikan fungsi-fungsi dalam organisasi tersebut, yang disebut sistem informasi fungsional. Sistem informasi fungsional bermanfaat untuk memberikan sediaan informasi bagi para manajer pada fungsi-fungsi organisasi. Sistem informasi akan bekerja pada fungsi-fungsi organisasi sesuai dengan derajat kebutuhan informasi pada tingkatan manajemen dalam organisasi.

Karakteristik dan tipe-tipe informasi akan terkait dengan kebutuhan informasi pada tingkatan-tingkatan manajemen dalam organisasi. Sistem informasi berfungsi mentransformasikan data menjadi informasi yang bernilai bagi tiap tingkatan manajemen. Sistem informasi mendukung pembuatan keputusan sesuai tahap-tahap pembuatan keputusan manajemen dalam organisasi.

Informasi dalam manajemen informasi dapat menjadi komoditi (barang yang diperdagangkan) sekaligus sebagai objek yang dapat ditata, diolah dan dijadikan bernilai dalam manajemen informasi bagi para pemakainya. Informasi dalam manajemen pengetahuan merupakan hal yang digali dan disebarkan sebagai suatu pengetahuan bagi organisasi tersebut, di samping itu informasi yang diolah dalam sistem informasi akan menjadi alat yang membawa dan mempercepat penyebaran serta penggalian pengetahuan dalam organisasi

Sumber Daya Manusia adalah aset yang paling penting dalam suatu organisasi. Pembangunan negara dan kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi tidak ada gunanya jika tanpa diikuti dengan pembangunan SDM.

Dinas perhubungan kota bandung mempunyai bagian tersendiri dalam organisasi yang khusus menangani urusan retribusi daerah. Dinamakan seksi retribusi dikarenakan hanya khusus menangani segala hal yang berhubungan dengan kegiatan retribusi. Seksi Retribusi mempunyai tugas Memimpin, membina, dan mengkoordinasikan kegiatan operasional program pendataan dan penilaian subjek/objek retribusi

daerah, perhitungan dan penetapan jumlah ketetapan retribusi daerah dan pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan dan atau diperintahkan oleh Kepala Bidang yang searah dengan kebijakan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Disamping itu, seksi retribusi mempunyai fungsi sebagai:

a) Pelaksanaan koordinasi antar bidang dan SKPD pengelola pendapatan asli daerah dalam rangka pendataan subjek/objek retribusi daerah.
b) Pelaksanaan konfirmasi dan koordinasi terhadap SKPD pengelola pendapatan asli daerah/retribusi daerah dalam upaya penetapan terget pendapatan.
c) Pelaksanaan penilaian, perhitungan dan penetapan jumlah ketetapan retribusi daerah.
d) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan dan atau diperintahkan oleh atasan sesuai ruang lingkup dan tanggungjawab kewenangannya.

4.4. Pengaruh faktor lingkungan bagi perkembangan Sistem Informasi Manajemen Data dalam penyusunan laporan retribusi daerah.

Sebelum membahas tentang pengaruh faktor lingkungan bagi perkembangan sistem informasi manajemen data dala penyusunan laporan distribusi, ada baiknya kita melihat tinjauan dari siklus kebijakan terlebih dahulu. Ada banyak keuntungan yang dapat diambil dari adanya siklus kebijakan ini yaitu.

a) Siklus kebijakan menegaskan bahwa pemerintah itu merupakan proses yang melibatkan banyak institusi dan bukan sekedar institusi yang berdiri independen tampa korelasi dengan pihak.
b) Siklus untuk kebijakan merupakan suatu model yang dapat digunakan untuk membantu mempermudah kompleksitas kebijakan publik .Dengan modal ini akan semakin memungkinkan para pengambil kebijakan dan masyarakat banyak memberikan focus pada tahapan-tahapan yang dipandang perlu disamping mengatur berbagai aspek yang diperlukan dalam setiap tahapan siklus tersebut.
c) Siklus kebijakan memberikan kesempatan yang bagus untuk secara sistimatis dan analitis melakukan kajian-kajian kebijakan publik yang relevan dengan area yang akan dibahas sehingga memberikan banyak kesempatan untuk belajar dari berbagai pengalaman kebijakan yang sudah ada selama ini termasuk plus minusnya.

d) Siklus kebijakan membantu membuat kebijakan dan masyarakat banyak dalam menentukan langkah-langkah strategis-strategis berkaitan dengan apa yang ingin dilakukan dalam sebuah kebijakan publik .

e) Siklus kebijakan juga akan memberikan gambaran yang komprehensif dan juga berbagai implikasi yang perlu dimengerti oleh para pihak yang berkepantingan dengan kebijakan publik .

f) Siklus kebijakan juga dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai efektifitas dan efesiensi sebuah kebijakan dilihat berdasarkan masing-masing tahapan itu. Siklus kebijakan penting untuk dipahami dan dimengerti dengan baik semakinbaik pemahaman terhadap siklus kebijakan maka akan semakin lengkaplah kerangka piker seseorang terhadap sebuah kebijakan publik. Siklus kebijakan meliputi identifikasi isu, analisis kebijakan,instrumen, kebijakan,konsultasi, koordinasi, keputusan, implementasi, evaluasi, dan umpan balik.

Berikut merupakan tahap – tahap dimana faktor lingkungan dan masyarakat sangat mempunyai arti penting dalam perumusan sebuah kebijakan yaitu sebagai berikut:

A. Tahap Identifikasi :

1. Identifikasi Masalah dan Kebutuhan:

Tahap pertama dalam perumusan kebijakan sosial adalah mengumpul-kan data mengenai permasalahan sosial yang dialami

masyarakat dan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi (unmet needs).

2. Analisis Masalah dan Kebutuhan:

Tahap berikutnya adalah mengolah, memilah dan memilih data mengenai masalah dan kebutuhan masyarakat yang selanjutnya dianalisis dan ditransformasikan ke dalam laporan yang terorganisasi. Informasi yang perlu diketahui antara lain: apa penyebab masalah dan apa kebutuhan masyarakat? Dampak apa yang mungkin timbul apabila masalah tidak dipecahkan dan kebutuhan tidak dipenuhi? Siapa dan kelompok mana yang terkena masalah?

3. Penginformasian Rencana Kebijakan:

Berdasarkan laporan hasil analisis disusunlah rencana kebijakan. Rencana ini kemudian disampaikan kepada berbagai sub-sistem masyarakat yang terkait dengan isu-isu kebijakan sosial untuk memperoleh masukan dan tanggapan. Rencana ini dapat pula diajukan kepada lembaga-lembaga perwakilan rakyat untuk dibahas dan disetujui.

4. Perumusan Tujuan Kebijakan:

Setelah mendapat berbagai saran dari masyarakat dilakukanlah berbagai diskusi dan pembahasan untuk memperoleh alternatif-alternatif kebijakan. Beberapa alternatif kemudian dianalisis kembali dan dipertajam menjadi tujuan-tujuan kebijakan.

5. Pemilihan Model Kebijakan:

Pemilihan model kebijakan dilakukan terutama untuk menentukan pendekatan, metoda dan strategi yang paling efektif dan efisien mencapai tujuan-tujuan kebijakan. Pemilihan model ini juga dimaksudkan untuk memperoleh basis ilmiah dan prinsip-prinsip kebijakan sosial yang logis, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

6. Penentuan Indikator Sosial:

Agar pencapaian tujuan dan pemilihan model kebijakan dapat terukur secara objektif, maka perlu dirumuskan indikator-indikator sosial yang berfungsi sebagai acuan, ukuran atau standar bagi rencana tindak dan hasil-hasil yang akan dicapai.

7. Membangun Dukungan dan Legitimasi Publik:

Tugas pada tahap ini adalah menginformasikan kembali rencana kebijakan yang telah disempurnakan. Selanjutnya melibatkan berbagai pihak yang relevan dengan kebijakan, melakukan lobi, negosiasi dan koalisi dengan berbagai kelompok-kelompok masyarakat agar tercapai konsensus dan kesepakatan mengenai kebijakan sosial yang akan diterapkan.

Biasanya suatu masalah sebelum masuk ke dalam agenda kebijakan, masalah tersebut menjadi isu terlebih dahulu. Isu, dalam hal isu kebijakan, tidak hanya mengandung ketidaksepakatan mengenai arah tindakan aktual dan potensial, tetapi juga mencerminkan pertentangan pandangan mengenai sifat masalah itu sendiri. Dengan demikian, isu

kebijakan merupakan hasil dari perdebatan definisi, eksplanasi dan evaluasi masalah.

Isu ini akan menjadi embrio awal bagi munculnya masalah-masalah publik dan bila masalah tersebut mendapat perhatian yang memadai, maka ia akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Namun demikia, karena pada dasarnya masalah-masalah kebijakan mencakup dimensi yang luas maka suatu isu tidak akan secara otomatis bisa masuk ke agenda kebijakan. Isu-isu yang beredar akan bersaing satu sama lain untuk mendapatkan perhatian dari para elit politik sehingga isu yang mereka perjuangkan dapat masuk ke agenda kebijakan.

A. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut direkomendasikan saran - saran sebagai berikut :

1. Mengadakan berbagai macam pelatihan dalam bidang pendukung pemantapan sumber daya manusia untuk menjalankan operasi sistem manajemen data di Dinas Perhubungan di kota Bandung.
2. Pemeliharaan komponen – komponen yang menunjang untuk perwujudan sistem informasi manajemen data yang baik sehingga perumusan data dalam pendataan retribusi daerah dapat berjalan dengan lancar serta tepat guna.
3. Peningkatan dalam hal pelayanan masyarakat yang selama ini kurang mendapatkan perhatian. Tentu saja ini sangat berpengaruh pada peningkatan citra Dinas Perhubungan itu sendiri.
4. Pengadaan kembali komponen – komponen yang menunjang dalam sistem informasi seperti *hardware* berupa komputer serta perangkat lunaknya.